

RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang

Harapan kuat mewujudkan Sambas yang berkeadilan, maju dan sejahtera, sebagaimana cita-cita yang telah tertanam lama sejak masa Kesultanan Sambas, hingga sekarang ini dalam bentuk Pemerintahan Kabupaten Sambas, tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang terbilang sangat menguji harapan masyarakat Kabupaten Sambas adalah terciptanya interaksi kelam antar etnis tahun 1999 lalu, yaitu melibatkan etnis Melayu Sambas sebagai masyarakat lokal dengan etnis Madura sebagai masyarakat pendatang, berupa konflik sosial yang menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa.

Konflik sosial berbentuk kekerasan massa yang terjadi di Kabupaten Sambas, setidaknya telah mengakibatkan 167 orang meninggal dunia, 65 orang luka berat dan 22 orang luka ringan. Hal tersebut dapat dinilai sebagai kegagalan etnis Melayu Sambas untuk menjalani kehidupan secara berdampingan dengan etnis Madura, meskipun diketahui tidak lahir dengan sendirinya. Perbedaan budaya masing-masing etnis yang bertikai kerap kali menjadi penghambat dalam membangun hubungan antar etnis yang harmonis, karena masing-masing etnis lebih bersifat etnosentris atas budayanya masing-masing.

Etnis Melayu Sambas sebagai masyarakat lokal di Kabupaten Sambas mengklaim bahwa setiap pendatang haruslah tunduk, patuh dan taat atas tatanan nilai, norma, budaya dan hukum yang berlaku di Kabupaten Sambas. Hal tersebut menurut etnis Melayu Sambas adalah -marwahll yang disimbolisasikan dalam ungkapan -dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Di pihak lain yaitu etnis Madura memandang bahwa ketidakberhasilan diperantauan adalah hak yang memalukan, sehingga etnis

Madura yang telah terbiasa bekerja keras, terlihat semakin ulet dan gigih untuk menuai kesuksesan di perantauan—khususnya di Kabupaten Sambas. Aktualisasi budaya -carokll untuk keberhasilan dari etnis Madura disimbolisasikan dengan “*ango*” *an poteya tolang, etembang poteya mata*” atau -lebih baik mati-putih tulang, dari pada menanggung malu—putih mata. ll

Etnis Melayu Sambas dalam hidup berdampingan bertahun-tahun lamanya, senantiasa merasa menjadi korban kekerasan dari oknum etnis Madura.

Kondisi yang kurang dilandasi saling pengertian tentang karakter budaya masing-masing etnis, karena sama-sama mempertahankan -marwahll budayanya, mengakibatkan etnis Melayu Sambas maupun etnis Madura sama-sama mengedepankan kodrat hewani dengan meninggalkan sifatnya luhurnya yang paling hakiki sebagai manusia, karena tidak lagi memiliki kemampuan mengedepankan *social control* dalam kehidupan kemasyarakatannya.

Salah satu jenis *social control* dimaksud adalah norma hukum. Ketika norma hukum tidak mampu mengekang naluri kekerasan pihak-pihak dari kedua etnis yang bertikai, ketika hukum beserta para aktor hukumnya

dianggap tidak mampu lagi melindungi, tidak mampu lagi bisa memuaskan rasa keadilan, dan tidak mampu lagi menciptakan perdamaian sosial, maka pada saat itulah terjadi hal-hal yang secara sosiologis diistilahkan sebagai *self help*.

Berdasarkan perspektif kalangan etnis Melayu Sambas bahwa tindakan *self help* terpaksa dilakukan, karena kerap kali merasakan perlakuan yang tidak adil dari peristiwa-peristiwa kriminal yang terjadi dalam setiap interaksi sosial dengan etnis Madura. Rasa kebencian kepada etnis Madura semakin menjadi manakala merasakan ada ketidakadilan dalam penegakan hukum atas kondisi yang merugikannya. Ketidakadilan itu mulai dirasakan sejak tahun 1950-an hingga meletusnya konflik sosial 1999. Pada masa itu oleh etnis Melayu Sambas mengenalnya sebagai tahun-tahun yang rawan bagi keselamatan dan dinamisasi hubungan dengan etnis Madura. Tahun-tahun yang rawan itu, sebenarnya juga dirasakan oleh kalangan etnis Cina/Tionghoa maupun etnis lainnya, karena seringkali mengalami kehilangan harta benda, bahkan jiwa.

Berdasarkan perspektif dari kalangan etnis Madura bahwa konflik sosial tahun 1999 terjadi, karena kecemburuan sosial yang berlebihan dari etnis Melayu Sambas atas keberhasilan-keberhasilan yang berhasil diraihinya di wilayah perantauan, khususnya di bidang ekonomi. Meskipun segenap tindak kriminal diakui—diantaranya—melibatkan oknum etnis Madura, tetapi tidaklah semua etnis Madura di Kabupaten Sambas kala itu pantas diklaim sebagai orang atau etnis yang jahat. Setiap tindak kriminal yang dilakukan oleh oknum dari etnis Madura telah diproses secara hukum, bahkan banyak diantara warga dari etnis Madura melakukan ikatan perkawinan campur antar etnis, tak terkecuali dengan warga dari etnis Melayu Sambas.

Berdasarkan argumentasi dari kedua etnis yang pernah bertikai itu, dapat menjadi referensi pemikiran bahwa prasangka sosial akibat tersumbatnya saluran komunikasi antar etnis, akibat etnis Melayu Sambas telah menutup dirinya, berkenaan ketidaksenangan atas sikap dan perilaku yang tidak menyenangkan yang diterima dari etnis Madura selaku pendatang. Sikap dan perilaku etnis Melayu Sambas tersebut, ternyata bersebelahan dengan sikap dan perilaku etnis Madura yang terbilang meraih keberhasilan di perantauan, melalui kerja keras, keuletan dan ketekunannya. Hanya saja disayangkan dibalik keberhasilan etnis Madura secara ekonomi itu, tidak diimbangi dengan kemampuannya dalam membangun interaksi sosial dengan etnis lainnya—terutama interaksi sosial dengan etnis Melayu Sambas sebagai masyarakat asli Kabupaten Sambas.

Konflik sosial dan pengusiran terhadap etnis Madura dari Kabupaten Sambas menurut beberapa tokoh Melayu Sambas, karena terabaikannya langkah-langkah untuk mengatasi perilaku kekerasan massa, dimana pemerintah lagi tidak mampu menindak secara tegas para pelaku tindak kekerasan massa demi tegaknya negara hukum, dan tatanan sosial yang arif dan bijak, apalagi bertindak cepat, tepat, tegas dan komprehensif untuk dapat membuat rasa aman dan nyaman dalam kehidupan interaksi sosial antar etnis.

Konflik dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sambas tahun 1999 itu, bukan saja telah menurunkan kepercayaan masyarakat lokal kepada etnis

Madura, tetapi juga dianggap sebagai frustrasi sosial yang tengah melanda etnis Melayu Sambas. Perilaku etnis Madura yang ditunjukkan selama berada di Kabupaten Sambas dianggap telah menciderai intensivitas penerimaan dan jalinan interaksi sosial yang dibangun masyarakat Sambas selama beratus-ratus tahun sebagai pusat pemerintahan yang multikultural. Secara historis bahwa Sambas adalah kerajaan dan kesultanan tertua di Kalimantan Barat—kejayaannya telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagai salah satu integritas kekuasaan politik, sosial dan ekonomi di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara.

Nilai-nilai budaya dan hukum masyarakat yang dibangun etnis Melayu Sambas kemudian dikenal sebagai pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genius*) yang menjadi dasar identitas kebudayaan (*cultural identity*). Kultur hukum masyarakat tersebut memang harus ditegakkan sebagai kata kunci untuk mewujudkan interaksi sosial antar etnis yang berbeda dalam suasana multikultural di Kabupaten Sambas dengan segenap ragam perbedaannya. Perbedaan-perbedaan dimaksud, meliputi perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat dan kedaerahan sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk.

Persoalan yang menjadi *legal gap*, sehingga etnis Melayu Sambas merasa belum bisa hidup berdampingan dengan etnis Madura, karena didasarkan atas kondisi traumatis saat hidup berdampingan—sebelum terjadinya konflik sosial tahun 1999 lalu. Kebiasaan oknum etnis Madura yang suka berbuat kriminal, bahkan teringat akan -keperkasaannya¹¹ di tempat-tempat tertentu, seperti; pasar tradisional, terminal bus/oplek, warung kopi dan tempat-tempat umum serta terminal kapal penumpang, menjadi ketakutan tersendiri bagi etnis Melayu Sambas maupun oleh etnik lain yang ada di Kabupaten Sambas.

Atas dasar kondisi yang belum bisa terobati hingga kini, menjadikan konflik sosial yang pernah terjadi itu sebagai persoalan identitas (konflik identitas), dan salah satu karakteristiknya yang dominan adalah tingkat ketahanannya mengenai pandangan (orientasi) ketidakadilan atas tekanan-tekanan pernah diterima (etnis Melayu Sambas) dari etnis Madura selama bertahun-tahun lamanya dalam perebutan sumber-sumberdaya ekonomi, politik dan sosial.

Minimnya penegakan hukum dan hingga kini yang dinilai belum pantas berdasarkan nilai dan norma serta cara pandang kultur Melayu Sambas, menjadikannya hingga kini belum dapat menerima kembali etnis Madura di Kabupaten Sambas. Sikap belum dapat menerima kembali tersebut, merupakan inti dari kultur etnis Melayu Sambas dalam menegakkan -marwah¹² yang direkatkan oleh nilai-nilai dan norma-norma adat dalam tangkup kaidah Islam yang dibangun sejak masa Kesultanan Sambas, guna melawan berbagai ketidakadilan yang terjadi.

Atas dasar itu maka budaya hukum masyarakat sebagai akar penyelesaian konflik semakin menjadi obyek penelitian yang sangat menarik untuk diteliti secara mendalam, mengingat peran budaya hukum masyarakat itu sangat penting dalam pembangunan sistem hukum nasional. Peran penting

budaya hukum masyarakat dalam pemulihan konflik di Kabupaten Sambas sangat menentukan, apakah dilaksanakan atau tidak berbagai produk peraturan yang berlaku guna memberikan kenyamanan di setiap interaksi sosial, sebagai upaya mewujudkan interaksi sosial di Kabupaten Sambas yang multikultural.

B. Permasalahan

Permasalahan pokok dalam disertasi ini yaitu: (1) Bagaimana budaya hukum masyarakat Madura dan Melayu Sambas dalam memahami simbol-simbol yang dimiliki masing-masing etnis? (2) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadi konflik antar etnis dan bagaimana pemulihannya? (3) Bagaimana konstruksi baru budaya hukum masyarakat yang dikembangkan etnis Madura dan etnis Melayu Sambas dalam pemulihan konflik yang berbasis nilai keadilan?

C. Proses Penelitian

1. Stand Point

Budaya hukum yang konstruktif sebagaimana simbolisasi budaya hukum etnis Melayu Sambas. berupa -berat sama dipikul dan ringan sama dijinjingl maupun simbolisasi budaya hukum etnis Madura, yaitu tindakan tidak menghargai dan tidak mengakui atau mengingkari peran dan status sosial, sama artinya dengan memperlakukan dirinya sebagai orang *tada'' ajhina* (tidak bermakna secara sosial dan budaya) yang pada gilirannya menimbulkan perasaan "*malo.*" Norma-norma sosial kedua etnis tersebut, dapat menjadi proteksi yang konstruktif kedua etnis yang pernah bertikai untuk dapat hidup lebih harmonis lagi, terhindari dari prasangka-prasangka sosial maupun pertentangan dalam perebutan sumberdaya ekonomi, sosial politik maupun lainnya. Perebutan sumberdaya secara destruktif memang memerlukan persaingan, tetapi selayaknya tetap dalam norma-norma yang dibangun oleh budaya masing-masing etnis. Atas dasar itu maka tindakan tepat dan bijaksana manakala proses internalisasi etnis Melayu Sambas tentang budaya etnis Madura perlu dilakukan, seiring telah dilakukannya reposisi dan reformasi budaya hukum etnis Madura pasca kerusuhan etnis tahun 1999.

2. Paradigma

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme dalam disertasi ini dipergunakan untuk membuktikan bahwa rekonstruksi budaya hukum diperlukan dalam rangka pemulihan konflik sosial, sehingga etnis Madura dan Melayu Sambas dapat kembali hidup secara berdampingan dan saling menghargai. Peneliti dalam disertasi ini bersikap netral terhadap obyek penelitian. Kenetralan ini diposisikan oleh peneliti untuk melihat budaya hukum masing-masing etnis yang berkonflik.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah bersifat *socio legal*, yaitu sebagai pendekatan yuridis, menekankan suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi dan perilaku-perilaku anggota masyarakat yang mempola. Pendekatan yuridis dilakukan untuk menganalisis nilai-nilai dan aturan-aturan yang penormaannya justru mampu menyelesaikan konflik sosial antara etnis Madura dengan Melayu Sambas. Selain itu bahwa penelitian tentang budaya hukum dalam penyelesaian konflik antar etnis di Kabupaten Sambas melalui penelitian kualitatif diharapkan dapat mendeskripsikan secara jelas dan mendalam, sehingga budaya hukum masyarakat dapat terkonstruksi secara konstruktif. Jika budaya hukum masyarakat konstruktif berarti konflik antar etnis dapat dihindari. Atas dasar itu maka penelitian ini akan mengkaji aspek hukum dengan memanfaatkan aspek sosial.

4. Metode Penelitian Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memerlukan bahan-bahan sebagai sumber penelitian yang akan dicari untuk diolah dan selanjutnya akan dianalisis guna mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang penulis ajukan. Bahan-bahan tersebut yaitu: (a) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum secara hierarki, dan dianalisis untuk mengetahui budaya hukum masyarakat dalam pemulihan pasca konflik sosial, khususnya konflik sosial antara etnis Madura dan Etnis Melayu Sambas tahun 1999 lalu; (b) Bahan hukum sekunder, adalah badan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan tentang konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia dalam kerangka hukum paten; dan (c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti; kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan sumber-sumber penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan menggunakan metode sistematis (sistem kartu), yaitu setelah mendapat semua bahan yang diperlukan kemudian dibuat catatan mengenai hal – hal yang dianggap penting bagi penelitian yang dilakukan. Sistem kartu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kartu kutipan dan kartu bibliografi. Kartu kutipan dipergunakan untuk mencatat atau mengutip sumber bahan hukum yang

digunakan yang berisi nama pengarang/penulis, judul buku, halaman dan mengutip hal-hal yang dianggap penting agar bisa menjawab permasalahan dalam penelitian ini, sedangkan kartu bibliografi dipergunakan untuk mencatat sumber bacaan bagi kepentingan penyusunan daftar pustaka.

Penelitian ini tidak hanya merupakan kajian literatur, dalam hal ini data penelitian diperoleh dari interaksi antara peneliti dengan para pemikir dan pakar hukum sesuai dengan kajian yang dianut, melalui pemikiran, pandangan, pendapat, atau pernyataan mereka sebagaimana dapat dibaca di berbagai literatur yang ada. Pengumpulan informasi dilakukan pula dengan wawancara dengan narasumber terpilih, wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan narasumber yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sesuai dengan data dan informasi yang diharapkan.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh, baik yang diperoleh melalui studi pustaka maupun wawancara, akan di analisis secara kualitatif. Tahap pengolahan dan menganalisis merupakan langkah setelah pengumpulan bahan hukum. Semua bahan hukum yang ada yang telah didapat dari hasil penelitian diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Adapun bahan yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Untuk mengetahui keakuratan dan kehandalan data dilakukan dengan triangulasi atau multi strategi, yaitu suatu metode untuk mengatasi masalah sebagai akibat dari kajian yang hanya mengandalkan satu teori saja, satu macam data dan satu metode penelitian saja.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Budaya Hukum Etnis Madura dan Melayu Sambas dalam Memahami Simbol-simbol yang Dimiliki Masing-masing Etnis.

Interaksi sosial etnis Madura dengan etnis Melayu Sambas sebagai etnis yang telah memiliki kontribusi besar dalam mendirikan Kabupaten Sambas terbilang dinamis secara fluktuatif. Dikatakan berfluktuatif bahwa manakala kejadian kriminal dengan melibatkan etnis Madura, maka etnis Melayu Sambas mulai menjaga jarak hubungan sosialnya, karena dikhawatirkan akan ikut terlibat dalam tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum etnis Madura tersebut, apalagi korban dari tindakan kriminal tersebut adalah etnis Melayu Sambas.

Kecenderungan hidup mengelompok sesama etnis Madura tersebut, menyebabkan masyarakat Madura sulit memahami karakter etnis lainnya, demikian juga sebaliknya bagi masyarakat setempat. Apalagi ditambah dengan kebiasaan dan karakter sebagian kecil diantaranya yang memiliki perilaku dan karakter menyimpang, sehingga terkadang melanggar norma-norma, adat-istiadat, agama bahkan hukum positif, karena terlibat dalam

berbagai tindak kriminal, seperti penggarapan lahan yang bukan hak miliknya, pencurian dan perampokan hingga menimbulkan korban jiwa. Aktivitas negatif oknum dari etnis Madura tersebut, karena masing-masing etnis kurang mengenali dan memahami karakter masing-masing yang disebabkan kondisi hidup yang mengelompok-mengelompok tersebut, semakin meneguhkan membenaran tentang *stereotype* yang minus dari masyarakat setempat—khususnya etnis Melayu Sambas terhadap masyarakat Madura.

Etnis Madura dan etnis Melayu Sambas dalam konflik sosial tahun 1999 lalu, adalah korban dari tidak kondusifnya interaksi sosial yang dilatarbelakangi oleh memudarnya kepercayaan atas masing-masing etnis, akibat kepentingan ekonomi dan politis pihak-pihak tertentu, serta kurang optimalnya supremasi hukum saat itu. Prasangka sosial negatif yang melekat pada satu atau kelompok orang sebagai oknum dari etnis Madura, kemudian digeneralisasikan kepada masyarakat atau etnis tersebut. Seperti; ada satu atau beberapa orang dari kelompok etnis Madura di Kabupaten Sambas yang suka berbuat arogan maka masyarakat Melayu Sambas akan beranggapan bahwa semua orang dari etnis Madura memang suka bertindak arogan, apalagi sikap-sikap arogan oleh orang Madura tersebut seringkali dialami oleh beberapa anggota masyarakat Melayu Sambas lainnya.

Besarnya tekanan-tekanan sosial, ekonomi maupun secara politik yang dialami etnis Madura, mengisyaratkan bahwa etnis Madura perlu merekonstruksi diri melalui pembangunan citra positif sebagai dasar untuk menyakinkan etnis Melayu Sambas (sebagai lawan saat bertikai), sehingga diperoleh penilaian bahwa interaksi sosial dalam rangka mencapai kesuksesan dalam berusaha, selayaknya tidak disikapi dalam bentuk kecemburuan sosial. Sebaliknya bahwa keberhasilan tersebut dapat dijadikan faktor pemicu untuk bersaing secara terbuka dan jujur pula oleh kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Tanpa adanya kemungkinan menyadari kekeliruan pada dasar-dasar prasangka tersebut, maupun perbedaan individual di dalam kelompok dalam skala etnisitas atau budaya, maka konflik sosial akan dapat terus terjadi dari rentang waktu generasi ke generasi. Atas dasar itu maka sangat diperlukan kesabaran, kearifan dan kemauan untuk kerja keras dari semua pihak dalam kurun waktu yang cukup panjang.

2. Faktor-faktor Penyebab Konflik Sosial Antara Etnis Madura dengan Melayu Sambas, dan Pemulihannya

Faktor budaya sehubungan karakter etnis Madura yang keras seperti itu, maupun karakter etnis Melayu Sambas yang kurang memiliki keterbukaan atas penerimaan perlakuan yang tidak menyenangkan terhadapnya, ditambah latar belakang kondisi geografis masing-masing etnis, tingkat pendidikan dan wawasan atau pengetahuan yang rendah, menjadikan masyarakat Madura maupun Melayu Sambas menempuh berpikir praktis dalam menyelesaikan permasalahan. Apalagi saat itu para

tokoh etnis Madura maupun etnis Melayu Sambas kerap kali disibukkan oleh urusan ekonomi dan politik, sehingga kurang berkonsentrasi secara penuh untuk menginternalisasi masyarakatnya masing-masing untuk menghindari kehidupan yang anarkhis dan bersifat kriminal.

Resistensi figur yang dibutuhkan etnis Madura di Kabupaten Sambas yang benar-benar mampu menunjukkan cara berpikir, bertindak dan berperilaku sesuai nilai-nilai moralitas, baik yang berasal dari ajaran agama (Islam) maupun nilai-nilai sosial budaya Madura, justru sebagai kelemahan yang dapat menghancurkan karakter etnis Madura, ditambah faktor lain yang turut mempengaruhi sehingga etnis Madura terpaksa terusir dari Kabupaten Sambas.

Kepercayaan etnis Madura adalah artikulasi dari eksistensi kesatuan sistem kepercayaan dan adat kebiasaan yang dihubungkan dengan benda-benda suci, yaitu benda-benda yang dipisahkan dan terlarang. Kepercayaan dan adat kebiasaan yang menyatukan semua itu ke dalam satu kesatuan hidup yang bercorak kerohanian bernilai keagamaan. Gambaran kepercayaan etnis Madura beridentikkan agama Islam sebagai deskripsi kolektif yang menyatakan bahwa upacara-upacara yang timbul dari kelompok etnis Madura untuk merangsang, memelihara atau menciptakan kembali keadaan mental dalam artian sebenarnya.

Kepercayaan yang kuat terhadap religi bagi etnis Madura telah mengantarkannya pada fungsi sosial dalam rangka menciptakan dan memperkuat solidaritas sosial. Atas dasar alasan agama inilah, segenap etnis Madura mampu memainkan perannya, karena dipandang dapat memberikan faedah sebagai dasar interaksi sosial dengan etnik lainnya di Kabupaten Sambas.

Perkembangan pergeseran nilai-nilai etnis Madura kiranya berimplikasi pada tingkat tradisinya. Kebiasaan di pulau Madura untuk membawa senjata tajam jika hendak bepergian di luar rumah, sudah mulai ditinggalkan karena banyak kasus kriminal yang melibatkan oknum dari etnis Madura dan kerap kali kejadian itu meresahkan masyarakat akibat kebiasaan di daerah asal yang terbawa-bawa diperantauan. Bahkan nilai-nilai budaya yang ditonjolkan dalam mengatasi persoalan sudah tidak lagi menggunakan cara-cara tradisional yang umumnya berbentuk balas-dendam, tetapi kini kiranya etnis Madura paham betul, bahwa jika melakukan cara-cara tradisional justru akan melahirkan konflik sosial sebagaimana terjadi pada tahun 1999 lalu.

Nilai-nilai baru yang dikedepankan sekarang berupa tampilnya tokoh-tokoh ulama, dan cendekiawan kalangan Madura setempat untuk mendatangi si korban, dan biasanya mengajukan dua opsi, yaitu menyatakan

sikap untuk bertanggung jawab terhadap pihak korban atau menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib untuk diselesaikan secara hukum. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa agar kalangan etnis Madura yang tidak terlibat langsung dalam perkara tersebut, dan tidak menjadi korban di kemudian harinya.

Hubungan pengembangan nilai baru ini sebenarnya sebagai bentuk penyempurnaan tradisi dengan adat istiadat lama etnis Madura sebagaimana tertuang pada legenda-legenda yang telah dikokohkan dalam proses penyelesaian masalah sebagaimana budaya carok, hanya saja, jika carok mengedepankan penyelesaian melalui pihak-pihak yang terlibat secara langsung, tetapi cara-cara baru ini adalah mengedepankan pihak-pihak yang berpengaruh dan bentuknya berupa negosiasi dalam suasana yang kondusif.

Terciptanya kolektivitas timbul dari tindakan individu sebelumnya yang terlibat dalam penafsiran pengambilan peran. Kuatnya ikatan masyarakat Madura—juga etnis Melayu Sambas—menimbulkan solidaritas yang kuat, bahkan berlebihan mengilustrasikan kesan, jika salah seorang anggota masyarakatnya melakukan kesalahan, dan mendapat tindak kekerasan sebagai aksi masa.

Atas dasar itu maka berdasarkan faktor historis keterlibatan konflik etnik Madura selama ini selalu dilandasi oleh perasaan penegakkan harga diri. Untuk itu perlunya mengintegrasikan harga diri dari segenap kalangan yang berbeda-beda itu dalam setiap proses integrasi masyarakat, mengenai pengenalan batas-batas ketersinggungan masing-masing etnis untuk saling menghargai dan bukan sebaliknya dijadikan instrumen ejekan untuk memancing ketersinggungan antar pribadi, atau golongan yang justru akan meluas kepada hal-hal yang melibatkan pertikaian antar etnis.

3. Rekonstruksi Budaya Hukum Etnis Madura dan Melayu Sambas.

Dampak kerusuhan etnis antara etnis Madura dengan Malayu Sambas hingga kini masih terasa, terutama bagi korban langsung kerusuhan sosial tersebut. Kekerasan antara etnis sudah saatnya dihentikan dan tidak perlu terjadi. Oleh karena itu, kalangan etnis Madura maupun etnis Melayu Sambas, bahkan etnis-etnis lainnya perlu -mereposisil diri dalam kontak sosialnya dalam setiap interaksi etnis.

Salah satu bentuk |mereposisil diri diantaranya adalah menekan potensi tindak kekerasan yang sewaktu-waktu dapat terjadi, yakni tidak membawa senjata tajam saat bepergian kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan kerja. Melakukan penyelesaian pertikaian antara orang Madura dengan etnis lain—terutama etnis Melayu Sambas—melalui -negosiasil ketimbang dengan

cara -mengancamll atau menyerahkan kepada penegak hukum (polisi) sebagai bentuk kesadaran etnis dalam interaksi sosialnya.

Pendidikan reposisi dan kesadaran etnis perlu terus dilakukan dalam rangka mengganti penggunaan cara-cara kekerasan menjadi cara-cara yang lebih simpatik. Oleh karena itu, perlu kesadaran etnis untuk saling bekerjasama dalam rangka menggalang persatuan untuk terwujudnya rumah adat masing-masing etnis. Reposisi dan revitalisasi etnis Madura dalam interaksinya dengan etnis lain di Kalimantan Barat melalui berdirinya Rumah Adat Madura tersebut, setidaknya mencerminkan itikad baik (*good will*) etnis Madura dalam pergaulan antar etnis. Hal tersebut memberikan arti upaya reposisi etnis Madura untuk mengurangi citra orang Madura yang cenderung menyelesaikan persoalan dengan cara-cara kekerasan berikut eksklusivismenya.

Kesadaran etnis Madura terhadap sesama warga dalam komunitas etnisnya secara hakiki sebenarnya menganut pola interaksi berjenjang. Sebagaimana sistem stratifikasi masyarakat etnis Madura sangat menghargai orang-orang Madura yang memiliki kehormatan secara ekonomi, faktor umur yang lebih tua dan kepemilikan ilmu pengetahuan serta kedalaman agama. Hanya saja, seiring dengan perjalanan waktu dan tempat—diperantauan—nilai-nilai yang idealnya mesti dikembangkan kalangan etnis ini mengalami pergeseran, dimana batas-batas kehormatan hanya dimiliki berdasarkan atas kepentingan. Minimnya pendidikan masyarakat Madura yang melakukan perantauan, dinilai perilakunya tidaklah sebaik dibandingkan jika yang datang dari golongan masyarakat etnis Madura yang berpendidikan dan yang memiliki kedalaman agama yang cukup.

Segenap kalangan elit Madura mengaku kini masyarakatnya lebih merasa tenang karena telah mampu menahan diri dengan alasan jika tetap mempertahankan perilaku semula—keras, kasar, brutal bahkan berindikasi kriminal—justru akan semakin memperburuk dan semakin mempersempit *living space* nya dalam membangun interaksi sosial, belum lagi kerugian dari berbagai aspek yang bakal dideritanya.

Perwujudan tindakan masyarakat etnis Madura merupakan manifestasi dari hasil saling mempengaruhi antara dorongan-dorongan atau motivasi yang dipunyai pelaku dengan stimuli yang dihadapi dalam lingkungannya serta kebudayaan yang dipunyainya sebagai acuan dari proses penilaian tindakan dan tabiatnya. Dalam pengertian ini eksistensi etnis Madura dinilai sebagai manusia yang aktif untuk memutuskan sesuatu tindakan yang harus diwujudkannya. Pada konteks tabiat manusia dan orientasi kegiatan, biasanya kebudayaan digunakan sebagai pedoman bagi kehidupan yang berisikan pengetahuan dan keyakinan-keyakinan tentang budaya hukum yang

dikembangkan dalam kehidupannya atau pengalaman-pengalamannya dalam hubungan antar etnis yang berlaku maupun berbagai informasi yang diperolehnya dalam kehidupan sosialnya.

E. Simpulan

Etnis Madura diketahui memiliki sikap etnosentris dan eksklusif dalam tatanan interaksi dengan etnis Melayu Sambas, dan memiliki kelemahan dalam kekuatan akal dan pikiran, sehingga bermakna keras dan kasar di setiap interaksi sosialnya. Minimnya pendidikan dan kedaran akan nilai-nilai budaya setempat yang harus dijunjung tinggi dan dihormati menjadikan etnis Madura harus terusir dari Kabupaten Sambas, setelah menjalani konflik sosial sebelumnya di tahun 1999 lalu. Kesan keras dan kasarnya karakter etnis Madura dengan berbagai tendensinya itu, praktis mengubur aspek positif sebagai pekerja keras dan tangguh secara fisik, berikut hasil-hasil kerja kerasnya selama menjalani kehidupan di Kabupaten Sambas. Terdikotominya simbol-simbol etnis Madura dengan masyarakat Melayu Sambas, dan burujung hingga kini belum berbaurnya kembali kehidupan bersama kedua etnis tersebut, adalah bukti kegagalan pemerintah dalam proses pembauran antar suku dan supremasi hukum.

Banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga konflik antar etnis antara etnis Madura dengan Melayu Sambas terjadi. Selain dikarenakan faktor perbedaan asal usul, nilai-nilai budaya sebagai dasar perbedaannya, juga dikarenakan karakter dan etnosentris dan eksklusivismenya etnis Madura sebagai pemicu konflik, serta lemahnya supremasi hukum sebagai faktor yang semakin memperlebar jarak kehidupan diantara kedua etnis dalam rangka pemulihannya, sehingga mengakibatkan kehidupan etnis Madura dan masyarakat Melayu Sambas tidak lagi dapat hidup berdampingan secara damai dalam wilayah Kabupaten Sambas.

Sebagai rekonstruksi baru budaya hukum masyarakat yang perlu dikembangkan etnis Madura khususnya, dan dalam rangka memulihkan kepercayaan kembali etnis Melayu Sambas pasca konflik sosial tahun 1999, adalah melakukan reposisi nilai budaya dalam rangka adaptasi/penyesuaian diri. Hal ini dimaksudkan bahwa seseorang atau kelompok etnis Madura akan diterima kembali, manakala mampu beradaptasi secara sosial dan menyesuaikan diri—*well adjusted*. Caranya adalah dengan memberi batas toleransi pada kegiatan sosial budaya yang memang dirasakan sebagai suatu tindakan yang benar-benar menghargai nilai-nilai kemasyarakatan, tidak melanggar hukum, selain melakukan perkawinan diantara kedua etnis tersebut, sehingga terjadi ekuilibrium kultur yang baru dari penggabungan kedua budaya tersebut.

F. Rekomendasi

Etnis Madura yang menjadi subyek penelitian ini, dianjurkan lebih bersikap arif dan bijaksana dalam menjalani setiap interaksi sosial dengan etnis Melayu Sambas, dan lebih mengedepankan penyelesaian secara musyawarah ditingkat elit etnis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan masing-

masing dan supremasi hukum. Hal tersebut dapat dicapai manakala etnis Madura maupun masyarakat Melayu Sambas sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai yang dipegang teguh masyarakat Kabupaten Sambas, yaitu -dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.¶

Penegak hukum hendaknya harus selalu siap, sedia dan tegas mengayomi masyarakat, serta lebih intensif mengupayakan pengembangan hubungan yang lebih harmonis diantara kedua etnis tersebut, menuju kehidupan Kabupaten Sambas yang lebih multikultural.

Pembauran antara etnis Madura dan masyarakat Melayu Sambas di Kabupaten Sambas hanya dapat berlangsung melalui *well adjusted*. Etnosentrisme hanya menjadi ancaman bagi proses integrasi sosial dan penegakkan hukum di Kabupaten Sambas. Oleh karena itu, perlu diusung pendidikan multikulturalisme bagi generasi muda kedua etnis yang pernah bertikai tersebut, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga menengah atas. Hal ini dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat maupun pihak-pihak pemerintah yang bertugas menegakkan supremasi hukum melalui kerjasama antar sektoral. Demikian pelajaran agama yang diajarkan secara eksklusif di sekolah-sekolah swasta harus diganti dengan bidang studi toleransi beragama.

SUMMARY OF DISSERTATION

A. Background

A strong hope to establish a just, developed, and prosperous Sambas has long been deeply rooted from the era of Sambas Sultanate to the era of Sambas Regency Governance. This dream is not without challenges. One of the biggest challenges for the Sambas people was the dark interaction in 1999 that involved the Melayu Sambas natives and the migrant Madurese that fomed a social conflict, which brought material losses and casualties.

The social conflict in the form of mass violence happened in Sambas Regency had caused 167 deaths, 65 severe injuries, and 22 minor injuries. The conflict could be seen as the failure of the Melayu Sambas to live side-by-side with the Madurese, although it was not the only reason to cause the incident. The cultural differences between the conflicting parties often became the hindrance to establish a harmonic cross-cultural relationship because each ethnic group has the ethnocentric attitude.

The Melayu Sambas as the natives of Sambas Regency claimed that every newcomer should obey the values, norms, cultures, and laws applied in Sambas Regency. It was considered as *-marwah* by the Melayu Sambas, which symbolized by the saying *-dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung* (literally translated as: where the earth is stepped, there the sky is upheld). On the other hand, the Madurese perceived that unsuccessful life while living away from the hometown was an embarrassing thing. Therefore, the Madurese work harder and harder to achieve successful lives in their migration—especially in Sambas Regency. The actualization of *-carok* culture of the success to live away from the homeland for the Madurese was symbolized by the saying *-ango'an poteya tolang, etembang poteya mata* which literally translated as -It is better to die with white bones rather than to bear the shame with white eyes.

The Melayu Sambas often thought that they were the victims of the violence done by the Madurese during their coexisting life for years. The condition of less mutual understanding between the cultural characters of each ethnic group made both of the Melayu Sambas and the Madurese maintained their *-dignity* or *marwah* of their own culture and put forward their animal instincts by forgetting their wisdom as human beings. They did not have the ability to emphasize on the social control in their community.

One kind of social control is legal norms. When legal norms could not oppress the violence of both the conflicting parties, when the law as well as the law enforcers was considered to be unable to give protection, enforce the sense of justice, and create social peace, then things that were sociologically called as *-self help* would occur.

Based on the perspective of the Melayu Sambas, the so called *-self-help* actions were necessary to be done because they often received unfair treatments from the criminal actions happened in the social interaction with the Madurese. Hatred toward the Madurese was getting bigger when there

were also unfair treatments in the law enforcements toward the adverse conditions. The unjust condition started from the 1950s to 1999 when the social conflict finally happened. The Melayu Sambas considered those years as vulnerable years for the safety and the relationship dynamics with the Madurese. The similar feeling toward the Madurese was also felt by other ethnic groups, such as the Chinese, that often lost their property or lives.

From the perspective of the Madurese, the social conflict happened in 1999 happened because of the excessive envy from the Melayu Sambas of the success attained by the migrant Madurese in Sambas, especially in the economic field. Although the Madurese confessed that some crimes were, indeed, done by the Madurese, but not all Madurese in Sambas Regency deserved to be claimed as evil people. All the crimes done by the Madurese had been processed legally. Even, there were so many Madurese committed in cross-cultural marriages, including with the Melayu Sambas.

Based on the arguments from both ethnics that used to have conflict in the past, it could be considered as a reference that social prejudice due to the blockage of the inter-ethnic communication channel happened because the Melayu Sambas had shut themselves off from the Madurese since they did not like the attitudes and behaviors of the Madurese as newcomers. The attitudes and the behaviors of the Melayu Sambas were contradictory to the attitudes and behaviors of the Madurese that were considered successful to manage their lives away from their homeland through their hard work, persistence and diligence. However, the economic success of the Madurese was not coherent with their ability to build social interactions with other ethnic groups—especially with the Melayu Sambas, who were the natives of Sambas Regency.

According to the elites of the Malayu Sambas, the social conflict and the eviction of the Madurese from Sambas Regency happened because of the absences of action to resolve the mass violence, in which the government was unable to take quick, appropriate, firm, and comprehensive actions toward the offenders for the sake of the law enforcement in Indonesia and wise and sensible social orders that can create safe and comfortable cross-ethnic interactions.

The 1999 violence in Sambas Regency did not only decrease the local ethnic's trust to the Madurese, but was also considered as a social frustration of the Melayu Sambas. The behavior of the Madurese who lived in Sambas Regency had impaired the intensity of acceptance and social interaction networks that had been being built by Sambas community for hundreds of years as the center of multicultural governance. Historically, Sambas was once the oldest kingdom and sultanate in West Kalimantan—its glory had been known since the Majapahit era as one of the political, social, and economic integrities in Nusantara and South East Asia.

Its cultural values and laws was known as the indigenous/local knowledge or local genius that became the foundation of its cultural identity. The legal culture of the community was preserved as a key to realize a multicultural social interaction in Sambas Regency, with the entire diversity it

has. The differences included ethnic groups, religions, and customs, as a complex characteristic of Indonesian society.

The legal gap happened between the Melayu Sambas and the Madurese was due to the past trauma when they lived side-by-side before the 1999 conflict emerged. The habits of the Madurese that liked to do crimes in their territories, such as in the traditional markets, bus stations, coffee shops, and other public places, created fears among the Melayu Sambas and other ethnic groups in Sambas Regency.

Because of the condition that has not been recovered completely, even until now, makes the past social conflict becomes an identity issue (identity conflict), which is characterized by the level of resistance toward the unfair orientations of the pressures received by the Melayu Sambas from the Madurese for years in their competition to attain the economic, politic, and social resources.

The lack of law enforcement, which is still considered inappropriate based on the values, norms, and perspectives of the Melayu Sambas, makes the Madurese cannot be fully accepted in Sambas Regency by the natives. This is the core of the *-marwahll* culture, which has been preserved since the Sambas sultanate era, to fight for the injustice condition based on the Islamic values and norms.

Therefore, the legal culture of the people as the basis to resolve the conflict becomes an interesting research object to be observed deeply due to the importance of community's legal culture in establishing a national legal system. The important role of the community's legal culture to resolve the conflict in Sambas Regency determines whether or not the law and regulations are enforced in order to provide comfort in every multicultural social interaction in the area.

B. Statements of the Problems

The main problems of this dissertation are: (1) How is the legal culture of the Madurese and the Melayu Sambas in understanding the symbols owned by each of the ethnic group? (2) What factors created the cross-ethnic conflict and how was the recovery? (3) How was the new construction of legal cultures developed by the Madurese and the Melayu Sambas during the conflict recovery efforts based on the value of justice?

C. Research Processes

1. Stand Point

The constructive legal culture, as symbolized by the Melayu Sambas' legal culture as *-bear the heavy burdens and carry the light problems togetherll* and by the Madurese as not respecting and ignoring the role and social status was interpreted as treating the Melayu Sambas as *-tada" ajhinall* (literally translated as: meaningless socially and culturally) that lead to the feeling of *-malo.ll* The social norms of the both ethnic groups could be used as a constructive protection for both conflicting ethnic groups so that they could live in harmony once again, far from social prejudice and

conflicts in the competition to get economic, social, politic, and other resources. Although competition is needed in the attempts to get the resources, but it is better that the competition is done under the norms established by each of the ethnic group. Based on the explanation, we can see the need of appropriate and wise actions in doing ethnic internalization process between the Melayu Sambas and the Madurese. In addition, reposition and reforms of legal culture of the Madurese has to also be done after the ethnic chaos in 1999.

2. Paradigm

The paradigm used in this research is constructivism paradigm. This constructivism paradigm used in this dissertation is aimed to prove that legal culture reconstruction is needed in the attempt of social conflict recovery, so that the Madurese and the Melayu Sambas can once again live together and respect each other. The researcher in this dissertation has neutral attitude toward the object of the research. This neutral attitude is done to see the legal cultures of each ethnic group.

3. Research Approach

The approach of this research is socio legal, as a juridical approach, which emphasizes on a real and functional social institutional in the community life that creates a pattern. The juridical approach is done to analyze the values and regulations that can actually resolve the social conflict between the Madurese and the Melayu sambas ethnic groups. In addition, through a qualitative research on legal culture in the ethnical conflict resolution in Sambas Regency is expected to describe clearly and deeply so that the community's legal culture can be constructed constructively. If the legal culture of the community is constructive, conflict can be avoided. Based on the argument, this research will examine the legal aspect by utilizing the social aspect.

4. Research Method

Data Type and Resource

This research needs some data as sources that will be attained to be processed and analyzed so that answers toward the research questions can be found. The data include: (a) Primary legal data, which consists of hierarchy rule of law that is analyzed to find the community's legal cultures in the recovery of the post-social conflict, especially between the Madurese and Melayu Sambas in 1999; (b) Secondary legal data, which is collected from text books, foreign journals, scholars' findings, legal cases, and symposiums done by the experts in social conflicts in Indonesia in order to form a patent law; and (c) Tertiary legal data, which gives guidance or meaningful explanations toward the primary and secondary legal data, such as law dictionary, encyclopedia, etc.

Data Gathering Method

The technique used to collect the research resources is a literature review toward the primary, secondary, and tertiary data. Those data are collected based on the formulated research topics and classified according to the sources and their hierarchy level to be reviewed comprehensively. The legal data collecting technique is done by using a systematic method (card systems), which means that after getting all the desired data, a note on things that are considered important for the research is made. The card systems used in this research are a quote card and a bibliography card. The quote card is used to record or quote the legal data resource used in the research, such as the authors' names, book titles, pages, and statements or opinions that are considered important to answer the research questions. On the other hand, the bibliography card is used to record the reading resources in order to form the bibliography.

This research is more than just a literature review because the data are also obtained from the interactions between the researcher and the scholars and the law experts based on the ideas that they believe, their thoughts, point of views, opinions, or statements that can be read in various presented literatures. The information is obtained through interviews with the chosen interviewees. The interviews are done based on the interview guidelines that has been formed previously, in line with the expected data and information.

Data Processing and Analysis Technique

The obtained data and information, both from the literature reviews and the interviews, will be analyzed qualitatively. The processing and analysis phases are done after the collection of the legal data. The entire legal data attained from the research are needed to answer the research questions. In addition, the data obtained from the literature review, law and regulations, and articles are outlined and connected one another systematically in order to answer the formulated research questions. To find out the accuracy and reliability of the data, triangulation or multi-strategy technique, which is a method to address the issues as a result of the study that solely rely on a single theory, data, or research method is used.

D. The Result of the Study and Discussions

1. The Legal Culture of the Madurese and the Melayu sambas in Understanding the Symbols Owned by Each of The Ethnic Group

The social interaction of the Madurese and the Melayu Sambas, which is an ethnic group that has given big contribution in establishing Sambas Regency, was dynamic and fluctuating. It was said to be fluctuating because when there was a crime involving the Madurese, the Melayu Sambas would automatically make a distance in their social interactions because the Melayu Sambas people had a worrisome that they would be involved or related in the crime case done by the Madurese, especially when the victim of the crime was the Melayu Sambas.

The tendency to always live in their own group made the Madurese difficult to understand the characters of other ethnic groups. The same condition also happened in the native community. The situation was worsened by few people in each of the Madurese community who misbehaved and violated the values, customs, religions, and even the positive law because they involved in criminalities, such as cultivating the land that was not their properties, thefts, and robberies that caused casualties. The negative activities of the Madurese strengthen the negative stereotype of the natives toward the Madurese, particularly because each of the ethnic group had less understanding of the characters of the other party because of the collective way of life.

In the 1999 social conflict between the Madurese and the Melayu Sambas was the result of adverse social interactions due to the fading trust of each of the ethnic group because of the economic and political interests of certain parties as well as the lack of law supremacy at that time. The negative social prejudice entitled to one or some of the Madurese was generalized to all of the Madurese community. For example, when there was a person or few people from the Madurese ethnic group who was arrogant, the Melayu Sambas would think that all Madurese were arrogant. This condition was worsened with the fact that there were many Melayu Sambas people who were treated arrogantly by the Madurese.

The overwhelming social, economic, and political pressures experienced by the Madurese signified that the Madurese needed to perform self-reconstruction through building positive images as a basis to convince the Melayu Sambas (as their opponent in the conflict) that the social interaction in order to attain success in business should not be addressed with social jealousy. In addition, the success could be a driving factor to compete openly and honestly, not only between the conflicting parties, but also for other ethnic groups.

Without the ability to realize that there were mistakes on the prejudice and the individuality inside the group in the scale of ethnicity and culture, social conflicts would keep happening from generation to generation. Therefore, patience, wisdom, and willingness to work hard needed to be done by all parties for a long period of time.

2. Factors that Caused the Social Conflict between the Madurese and the Melayu Sambas and Its Recovery

The cultural factors of the Madurese who were rigid and firm and of the Melayu Sambas who were less acceptance toward unpleasant treatments they received, plus geographical differences between their places of origin and the low level of education and knowledge made the Madurese and the Melayu Sambas preferred practical solutions to solve problems. Moreover, the elites of both ethnic groups were busy of economic and political issues so that they did not fully concentrate to internalize each of their community to avoid anarchy and criminality life.

Figures needed by the Madurese in Sambas Regency, the one who was really able to show how to think and behave according to the morality values that came from the religion (Islam) or Madurese social and cultural values, were actually weaknesses that could destroy the characters of the Madurese. There were also other factors that also influenced the reasons why the Madurese were expelled from Sambas Regency.

The beliefs of the Madurese were the articulation of the unity between belief systems and customs, which was connected by forbidden sacred items. It is the beliefs and the customs that unite all the things in the religious life. The belief of the Madurese was identical to Islam as a collective description stating that the ceremonies done by the Madurese were aimed to re-flourish, re-preserve, or re-create the mental condition in the real meaning.

Strong beliefs of the Madurese toward the religion values had led them to the social function that created and strengthen social solidarities. Based on the religion belief, all the Madurese could perform their roles, because religion belief was useful as a foundation for social interaction with other ethnic groups in Sambas Regency.

The shifting of the Madurese ethnical values implies on the level of the traditions. The old habit of the Madurese in their homeland—Madura Island, to carry sharp weapons whenever they went outside had been abandoned because there were many criminal cases involving the Madurese bothered the natives since the Madurese brought the habit to the new land. Even, the traditional ways of cultural values used to resolve problems are no longer used, such as revenges, because the Madurese have understood that the traditional ways will create another social conflict, just like what happened in 1999.

The new values that are established now are the existence of Madurese Moslem elite figures and scholars of the respective areas to visit the victims by offering two options: making a statement that the doers will fully responsible for the victims or trusting the whole case to the authorized party—the law. This is done with the reason that the Madurese who are not directly involved in the case will not be victims in the future.

The development of the new value relationships is actually done to enhance the old traditions and cultures of the Madurese that have been written in the legends and ancient figures in the attempt to solve the problems, such as the *carok* culture. The difference is that in *carok* culture, the problems are solved by the related parties who conflict directly, but in the new culture, the Madurese uses the influential figures to do negotiation in a conducive environment.

Collectivism appeared as a result of the individual actions that involved in the decision making process. The strong bond between the Madurese—as well as between the Melayu Sambas, created strong solidarity, which often created ethnocentrism, especially when one of the members did a mistake and received physical violence through a mass action.

Therefore, based on the historical factors of the Madurese involvements in the conflicts were always caused by upholding the dignity. So, integrating the dignity of all different parties is needed in the community integration process, so that each party understands each other's limit of insulting or offending actions so that they can respect instead of violating each other that finally led to bigger things, such as cross-ethnic conflict,

3. The Reconstruction of Legal Culture between the Madurese and the Melayu Sambas

The impact of the ethnical conflict between the Madurese and the Melayu Sambas still can be felt up to now, especially for the direct victims of the social conflict. Ethnical chaos should be stopped now as it is not supposed to happen. Therefore, the Madurese and the Melayu Sambas, as well as other ethnic groups, should reposition themselves in their social contacts to other ethnic groups.

One form of self-repositioning is to press the potential violent that can happen at any time, such as by not bringing sharp weapons everywhere, unless for working purposes. In addition, conflict resolution through negotiations or bring the case to the police instead of threatening the opposite party is another proof of ethnic awareness in their social interactions.

Reposition education and ethnic awareness should continually be done in order to change the use of violence to more sympathetic actions. Therefore, ethnic awareness needs to be built so that all parties could cooperate each other to gain unity in order to establish every ethnic group's traditional house. Ethnic reposition and revitalization on the Madurese in their interaction with other ethnic groups in West Kalimantan through the establishment of the Madurese traditional house reflected the Madurese good will to decrease the image of harshness and exclusivist.

The awareness of the Madurese toward all people in their ethnical community actually follows hierarchy pattern. The stratification system of the Madurese highly respects those who have higher economic status, are older, smarter, and considered to have better religious states. However, in the migration areas, this value has shifted, in which respect is merely given based on interests. The uneducated Madurese's behaviors are perceived to be not as good as the more educated and pious ones.

All Madurese elites admit that its people are now more delightful and peaceful because they have better self-control because they realize that if they preserve the rigidness, harshness, and brutality, which indicated to criminal actions, their living space will be limited and the social interaction will be worsened—plus many other disadvantages from various aspects that they will suffer from.

The actions performed by the Madurese were the manifestation of interplay between drivers or motivations owned by the doers and the stimuli faced in their environments as well as the culture they have that are used to measure the attitudes and behaviors. In this respect, the existence of the Madurese is perceived as active human beings that decide an action they must

do. In the context of human attitude and activity orientation, culture is often used as guidance of life, which consists of knowledge and beliefs that is developed in life or the existing cross-ethnic relationship experiences, as well as various information obtained in the social life.

E. Conclusion

The Madurese were known to have ethnocentric and exclusive behaviors in their interactions with the Melayu Sambas and were lack of intellectual abilities so that they often behaved rudely and rigidly in their social interactions. The minimum level of education and awareness of the existing cultural values in Sambas that should be respected made the Madurese had to be expelled from Sambas Regency after the social conflict happened in 1999. The rigidity and rudeness characters of the Madurese with all of their tendencies had buried the positive aspects of the Madurese as hard workers and physically strong people.

The dichotomy of the Madurese's and the Melayu Sambas' symbols, which results on the relationship between the two groups that has not been diffused properly, yet, is the proof of the government's failure in the assimilation process between the ethnic groups and the law supremacy.

There were many factors that caused the ethnic conflict between the Madurese and Melayu Sambas. Not only the places of origin and cultural values that became the main reasons of the differences, but also the characters, ethnocentrism, and exclusiveness of the Madurese, as well as the weak law supremacy that widen the gaps between the two ethnic groups in the recovery process so that both of the ethnic groups cannot live side-by-side peacefully in Sambas Regency.

The reconstruction of the community's legal culture that should be developed, especially by the Madurese, to regain trust from the Melayu Sambas after the 1999 conflict, was done through cultural value reposition in order to do self-adjustment. It meant that an individual or a group of Madurese could be re-accepted when they could socially adapt and be well adjusted. The idea was to give a tolerant limit in the socio-cultural activities that was based on an action that highly appreciate the social values and did not violate the law, such as by cross-cultural marriage between the two ethnic groups, so that a new cultural equilibrium from the diffusion of the two groups could be formed.

F. Recommendation

The Madurese that becomes the subject of this research is recommended to be wiser and more prudent to undergo any social interactions with the Melayu Sambas, put forward the settlement of problems through consensus in the level of ethnic elites, and uphold each other's community values and law supremacy. The condition can be attained if both the Madurese and the Melayu Sambas highly respect the values that are strongly held by the Sambas Regency community, which says -where the earth is stepped, there the sky is upheld.¶

The law enforcers should always be ready, willing and firm to protect the people, as well as more intensively seek for the development of a more

harmonic relationship between the two ethnic groups in order to establish a more multicultural Sambas Regency.

Assimilation between the Madurese and the Melayu Sambas in Sambas Regency can only be done through well adjusted behaviors. Ethnocentrism can only become a threat in the process of social integration and law enforcement in Sambas Regency. Therefore, multicultural education for young generations of the two conflicting groups should be promoted, starting from elementary levels to middle and high school levels. It can be done by the Education Board of West Kalimantan Province or other government authorities that has the duty to enforce the law supremacy through cross-sectors cooperation. In addition, the religion lesson, which is taught exclusively in private schools, should be changed a into religious tolerance lesson.